

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Penelitian

Jakarta merupakan kota sejarah yang diwariskan sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga menjadi Jakarta. Semuanya terhubung dengan sebuah kesamaan yaitu kota dagang yang metropolitan dan mempertemukan banyak suku dan bangsa, serta aneka ragam kebudayaan. Di masa masih bernama Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia, Jakarta berkembang di kawasan utara yakni kawasan yang disebut sebagai kota tua Jakarta. Di tempat itulah, kemudian dibangun tatanan kota yang kemudian menjadi pusat kekuasaan kolonialisme di masa Hindia-Belanda.

Berlangsungnya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Lapangan Ikada, Jakarta, menjadikan Jakarta sebagai saksi telah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Jakarta hadir menjadi wajah ibu kota negara yang baru merdeka, menandai terjadinya perubahan tata kota Jakarta. Namun, setelah merdeka, Indonesia harus dihadapkan dengan adanya revolusi fisik pada tahun 1945-1950 dalam mempertahankan kemerdekaannya. Akibatnya, belum banyak yang berubah dari tata kota Jakarta, karena keadaan kota yang tidak aman dan sering berpindah-pindah. Perubahan dan perkembangan tata kota Jakarta baru dimulai pada tahun 1950.

Ketika Indonesia sudah Merdeka, Belanda melakukan penyerangan kembali ke Indonesia yaitu dengan melakukan agresi militer. Pada agresi

militer, terjadinya perpindahan Ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta dan Bukittinggi. Pada agresi militer Belanda I, keadaan Jakarta tahun 1946 diduduki oleh tentara sekutu dan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Karena keadaan Jakarta yang tidak aman, dan untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dengan negara yang baru merdeka, maka ibukota negara segera dipindahkan ke Yogyakarta dan mendapatkan dukungan penuh dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan akhirnya Yogyakarta menjadi ibukota dari Republik Indonesia (Henni, 2013).

Kemudian, pada tahun 1948 Belanda melancarkan serangan militer kembali yakni agresi militer Belanda II. Serangan agresi militer ditujukan ke Yogyakarta karena menjadi Ibukota negara Indonesia. Dengan dikuasainya Yogyakarta, dan ditangkapnya Soekarno dan Moh. Hatta oleh Belanda. Ketika Belanda menguasai Yogyakarta, dan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Belanda merasa bahwa ditangkapnya Soekarno dan Moh. Hatta, membuat Indonesia kehilangan pusat pemerintahannya, maka Indonesia dapat dikembalikan ke Belanda.

Sebelum serangan militer Belanda kedua digencarkan, Soekarno dan Moh. Hatta memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara Ketika sedang di Bukittinggi Sumatera Barat yang mempunyai jabatan sebagai Menteri Kemakmuran, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) melalui radiogram. Namun, belum sampai Syafruddin Prawiranegara menerima mandat tersebut, karena jalur komunikasi radiogram terputus akibat serangan Belanda. Mengetahui Soekarno dan Moh. Hatta

ditangkap Belanda, Syafruddin Prawiranegara mengambil tindakan untuk mendirikan pemerintahan darurat di Bukittinggi. Selama berdirinya PDRI di Bukittinggi menjadikan sebagai pemerintahan pusat. Pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Soekarno dan PDRI resmi dibubarkan (Moch, 2015). Setelah, situasi di Jakarta sudah mulai membaik, pusat pemerintahan kembali lagi di Jakarta.

Pemilihan Jakarta kembali sebagai pusat pemerintahan setelah 27 Desember 1949 tidak hanya ditentukan oleh berakhirnya keadaan darurat. Kota ini telah memiliki pelabuhan, jaringan jalan dan kereta api, kantor pemerintahan, layanan komunikasi, perbankan, serta hubungan diplomatik yang dibangun sejak masa kolonial. Yogyakarta memberi ruang aman bagi Presiden, Wakil Presiden, dan kementerian ketika Jakarta dikuasai Sekutu dan NICA, sedangkan Bukittinggi menjaga kelangsungan Republik melalui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia saat pimpinan nasional ditawan. Peranan kedua kota tersebut lahir dari kebutuhan mempertahankan negara pada masa revolusi. Jakarta dipilih kembali karena perangkat pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan hubungan internasional dapat dipusatkan pada kota yang sama. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa Yogyakarta menjalankan fungsi ibu kota sejak 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949 akibat keadaan Jakarta yang tidak aman (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2023).

Pemerintahan Kotapraja diatur pada Undang-Undang Daerah R.I.S tanggal 13 Mei 1950, yang berlaku surut pada tanggal 31 Maret 1950, dengan

nama Undang-Undang Pemerintahan Djakarta Raya tentang pemerintahan atas ibukota Djakarta sesuai dengan ketentuan dalam pasal 50 Konstitusi R.I.S. Dalam Undang-Undang tersebut, diatur juga mengenai kedudukan kota Djakarta sebagai daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri, yang sejak waktu yang lalu juga berada dalam peninjauan pemerintahan R.I.S. Serta, dalam susunan aparatur pemerintahan Kotapradja Djakarta Raya, masih tetap yang diatur dalam Keputusan Presiden R.I.S No. 114 tahun 1950 tentang Dewan Perwakilan Kota Sementara, Badan Pemerintahan Harian, dan Walikota. Nama Kotapraja sudah digunakan dalam keputusan Presiden R.I.S tanggal 11 Maret 1950 No. 114 mengenai pengertian kota otonom, serta dalam keputusan presiden tanggal 28 Februari 1950 No. 93 untuk istilah “haminte-kota” yang artinya sama seperti ‘stadsgemeente’. Setelah adanya wilayah yang baru, maka batas-batas wilayah Kotapraja Djakarta Raya menjadi 530 km (lebih besar dibanding wilayah Staatsgemeente Batavia. (Gie, 1958)

Pada tanggal 17 Agustus 1950, R.I.S berubah menjadi Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dengan ini, maka berubah pula konstitusi R.I.S. Wilayah dari bekas negara R.I.S bergabung ke Indonesia oleh pemerintah Indonesia di Yogyakarta, dengan dibentuk menjadi daerah swatantra berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah berlaku untuk wilayah dengan status quo di perjanjian Renville di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Maka, ketika berakhirnya R.I.S, Kotapradja Djakarta tetap mengikuti aturan yang berlaku di R.I.S karena perubahan struktur negara tidak mempengaruhi kedudukan Kotapradja Djakarta Raya sebagaimana diatur

dalam S.G.O, Undang-Undang darurat R.I.S No.20 tahun 1950, dan dibawah pemerintahan pusat (Menteri Dalam Negeri). Kotapradja Djakarta memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota besar, selain itu juga satu-satunya yang memakai sebutan kotapradja. Pada wilayah Kotapradja Djakarta Raya, dibagi secara administratif dengan memiliki 6 Kewedanaan (district), 20 Kecamatan, dan 136 kelurahan (Gie, 1958).

Kepemimpinan di Jakarta mengalami transformasi signifikan seiring perubahan status kota dari wilayah administratif menjadi Daerah Khusus Ibukota. Pada masa Suwiryo (1950–1951) Jakarta diperluas cakupan administratifnya mencakup wilayah seperti Kepulauan Seribu dan Kebayoran. Ia mulai membentuk dasar tata ruang dan perencanaan kotamodern, walau masih terbatas pada perencanaan awal (Sedyawati dkk., 1986). Selanjutnya, masa kepemimpinan Sjamsuridjal (1951–1953) ditandai dengan fokus pada pembangunan pelayanan publik dasar, seperti penyediaan listrik, air bersih, urusan pertanahan, serta pembangunan fasilitas kesehatan. Selain itu, pemerintah membangun Pusat Tenaga Listrik di Ancol, instalasi penjernihan air (*waterzuivering*) di Pejompongan, serta perumahan rakyat di Bendungan Hilir, Karet, Pasar Baru, dan Jembatan Duren yang diperkirakan mampu menampung sekitar 33.000 penduduk. Kepemimpinan Sudiro (1953–1960) Membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Praja Jakarta. Ia membagi wilayah Jakarta menjadi tiga wilayah administratif dan memprakarsai pembentukan Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Kampung (RK) sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal. Pada

masa pemerintahannya juga dilaksanakan berbagai proyek pembangunan, seperti Waduk Pluit, Jalan Raya Tanjung Priok–Cililitan (Jakarta Bypass), pembangunan Perumahan Anggota DPR di Grogol, persiapan pembangunan Masjid Istiqlal dan Hotel Indonesia, pembangunan Kota Mahasiswa di Rawamangun, pembangunan instalasi air minum di Pejompongan, serta Jembatan Besi (Sopandi dkk., 2019).

Transformasi monumental Jakarta terjadi di bawah Soemarno Sosroatmodjo (1960–1964), di mana berbagai proyek nasional Sukarno direalisasikan di ibu kota, termasuk kompleks olahraga Senayan untuk Asian Games 1962, Hotel Indonesia, Masjid Istiqlal, dan pembangunan Monas. Proyek-proyek ini bukan hanya bertujuan modernisasi fisik Jakarta, tetapi juga merepresentasikan Jakarta sebagai etalase identitas nasional (Merrillees, 2015). Secara keseluruhan, para pemimpin Jakarta pada periode ini berkontribusi terhadap modernisasi tata kota, pengentasan pemukiman kumuh, pengembangan infrastruktur strategis, dan pembentukan simbol-simbol nasional. Langkah-langkah tersebut membentuk fondasi penting bagi pertumbuhan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia modern.

Secara infrastruktur, Jakarta mulai diarahkan untuk menjadi kota modern yang mencerminkan identitas nasional. Hal ini terutama terlihat pada masa menjelang Asian Games IV tahun 1962, ketika Presiden Soekarno menggagas proyek-proyek monumental seperti pembangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional.

Selain itu, pembangunan jalan-jalan protokol seperti Jalan Thamrin, Sudirman, dan Jakarta Bypass menunjukkan arah modernisasi fisik kota. Namun, pembangunan yang bersifat simbolik ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan sosial di tingkat masyarakat bawah. Ketimpangan antara pembangunan monumental dan kondisi sosial masyarakat menjadi ciri khas situasi Jakarta pada masa ini.

Kedudukan Jakarta sebagai daerah tingkat I tidak dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah menempatkan Kotapraja Jakarta Raya sebagai daerah tingkat I. Jabatan kepala daerah masih dijalankan oleh wali kota sampai Soemarno Sosroatmodjo dilantik sebagai gubernur pada 1960. Status Daerah Khusus Ibukota dibentuk melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 menegaskan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan nama Jakarta.

Urutan hukum tersebut memperlihatkan perubahan bertahap dari pemerintahan kota menuju pemerintahan daerah khusus. Peningkatan tingkat daerah memberi Jakarta kapasitas koordinasi yang lebih luas, sedangkan pembentukan DKI menyesuaikan struktur pemerintahan dengan beban pusat negara. Perubahan itu lahir karena urusan pelayanan kota, keamanan, pembangunan, kegiatan kementerian, dan hubungan diplomatik tidak lagi dapat ditangani melalui kewenangan pemerintahan kota biasa.

Pada tahun 1959, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Jakarta Raya. Berdasarkan

peraturan tersebut, Jakarta berubah status administratifnya menjadi Daerah Tingkat I atau setara dengan Provinsi di Indonesia, yang dipimpin oleh Gubernur sebagai kepala daerah dengan memiliki kewenangan otonomi sendiri. Soemarno Sosroatmodjo menjabat sebagai Gubernur yang dipilih langsung oleh Soekarno. Perubahan status administratif Kota Jakarta yang menjadi Daerah Tingkat I, berdasarkan untuk bisa fokus terhadap penyelesaian berbagai masalah yang terjadi, terlepas dari sejarah Jakarta itu sendiri.

Dikeluarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, berdasarkan peraturan tersebut wilayah Kotapraja Jakarta menjadi daerah khusus Ibukota Jakarta Raya, sebagaimana untuk dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bangsa Indonesia, yang dipimpin oleh Gubernur atau kepala daerah yang bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri, dan dibawah langsung presiden.

Kemudian, pada tahun 1964 dikeluarkannya khusus Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka secara yuridis Jakarta tetap menjadi ibukota negara kesatuan Republik Indonesia tanpa memindahkannya ke wilayah yang lain. Dari perubahan status administratif Jakarta, dibangun juga gedung-gedung monumen untuk menunjukan ciri khas nasionalisme Indonesia. Dimana, pembangunan ini menjadi cikal bakal simbolik Jakarta sebagai miniatur Indonesia. Pembangunan Jakarta tahun

1950-1964 diantaranya adalah pembangunan kawasan kebayoran baru, jalan Thamrin-Sudirman, Hotel Indonesia, Monumen Nasional, Monumen Selamat Datang, Patung Dirgantara Pancoran, Jakarta Bypass, GBK, Planetarium, dan Masjid Istiqlal. Selain terjadinya pembangunan yang ada di Jakarta, juga memiliki dampak untuk masyarakat Indonesia untuk berdatangan ke Jakarta atau melakukan urbanisasi karena Jakarta telah menjadi ibukota negara Indonesia.

Keunikan Jakarta terletak pada jarak waktu antara pelaksanaan fungsi ibu kota dan pembentukan status daerah khusus. Presiden, kementerian, lembaga negara, serta perwakilan asing telah bekerja di Jakarta ketika bentuk pemerintahannya masih Kotapraja. Keadaan itu membuat Jakarta memikul dua kepentingan sekaligus, yaitu pelayanan penduduk kota dan kebutuhan penyelenggaraan negara. Status hukum yang masih bertumpu pada pemerintahan kota tidak sepenuhnya sebanding dengan beban nasional yang terus bertambah. Perbedaan antara fungsi faktual dan bentuk hukum inilah yang mendorong peningkatan kedudukan Jakarta secara bertahap sampai memperoleh pengakuan sebagai Daerah Khusus Ibukota (Asmuni & Farida, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, kajian mengenai perkembangan Jakarta dalam konteks perubahan administratif dari statusnya Kota Praja menjadi Daerah Khusus Ibukota dengan rentang waktu tahun 1950-1964 menjadi hal yang penting untuk diteliti. Alasan pentingnya penelitian tersebut adalah karena untuk mengetahui perkembangan status administratif Jakarta dari Kota

Praja hingga menjadi Daerah Khusus Ibukota yang mempengaruhi struktur pemerintahan, perluasan wilayah, pembangunan tata kota Jakarta dan kehidupan masyarakat Jakarta maupun Masyarakat Indonesia yang secara tidak langsung mendorong untuk melakukan urbanisasi ke Jakarta. Selain itu juga, peneliti akan memfokuskan penelitian ini kepada alur perkembangan Jakarta fungsinya sebagai struktur pemerintahan, status administrasi, pembangunan-pembangunan tata kota, serta dampaknya terhadap masyarakat dengan status kota Jakarta sebagai Kota Praja dan Daerah Khusus Ibukota.

Fokus penelitian ini ditempatkan pada transformasi administrasi Jakarta, yaitu perubahan kedudukan hukum, susunan lembaga pemerintahan, pembagian kewenangan, hubungan dengan pemerintah pusat, dan jangkauan wilayah yang berlangsung selama 1950–1964. Perkembangan penduduk, pembangunan fisik, urbanisasi, dan pembentukan simbol nasional tidak berdiri sebagai pokok kajian tersendiri, tetapi digunakan sejauh memperlihatkan sebab atau akibat dari perubahan administrasi. Rangkaian Kotapraja Jakarta Raya, Daerah Tingkat I, Daerah Khusus Ibukota, hingga penetapan Jakarta sebagai ibu kota menunjukkan bahwa kekhususan Jakarta lahir dari fungsi pemerintahan yang tidak dimiliki kota lain. Pembagian kewenangan yang berbeda tersebut dapat dipahami sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang menyesuaikan organisasi daerah dengan beban strategis ibu kota (Putri dkk., 2025). Kekhususan itu tetap menempatkan Jakarta dalam pengawasan pusat sehingga otonominya berkembang bersama kepentingan politik nasional, bukan sebagai kemandirian daerah yang terpisah dari negara (Bath, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis temukan yang digunakan sebagai acuan, dan perbandingan bagi penelitian ini yaitu;

1. Dari Djakarta ke Djajakarta: Sedjarah Ibu-kota kita, oleh Dr. Soekanto. Buku ini mengenai perkembangan Jakarta dari Djakarta – Batavia – Djajakarta. Dengan memfokuskan terhadap perkembangan kota Jakarta pada masa kolonial dengan memperlihatkan ruang lingkup pemerintahan kolonial didalam Jakarta.
2. Sejarah Kota Jakarta 1950 – 1980 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini merupakan penelitian mengenai perkembangan Sejarah Jakarta dari tahun 1950 – 1980, meliputi perkembangan Jakarta lebih menekankan terhadap pembatasan sosial seperti masalah masalah yang timbul akibat dari kepadudukan, dan pengembangan fasilitas rekreasi dan Pendidikan seperti Ancol, Kebun Binatang, Taman Ismail Marzuki dan lain lain dengan sampai tahun 1980.
3. Perkembangan Sejarah Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan Indonesia, oleh Firmanda Dwi Septiawan. Penelitian ini memfokuskan terhadap masalah sosial terhadap penduduk Jakarta sebagai masyarakat campuran. Sehingga penelitian ini menampilkan masalah sosial yang ada pada kota Jakarta.
4. Kota Jakarta Tahun 1950 – 1980: Sebuah Tinjauan Sejarah Perkembangan Kota, oleh Irmawati M. Johan. Penelitian ini merupakan laporan penelitian terhadap perkembangan kota Jakarta. Dalam

penelitian ini membahas pembagian Jakarta dari masa kolonial atau kota Batavia. Dalam pembahasan kota Jakarta, membahas dari sudut tanah, penduduk, pengembangan sarana prasarana umum, serta masalah masalah yang timbul seperti banjir, sampah, dan lain-lain. Dan juga pengembangan wilayah Jakarta untuk dibagi menjadi kota inti, areal perumahan, industri dan usaha lain lainnya.

Dalam keempat tulisan yang sudah dijabarkan di atas, memiliki topik dan rentang tahun yang berbeda dengan topik yang ingin diteliti oleh penulis. Topik pembahasan yang akan dibahas oleh penulis adalah “*Transformasi Status Administrasi Jakarta: Dari Kota Praja Menjadi Daerah Khusus Ibukota (1950-1964)*”. Berbeda dengan penulisan sebelumnya, penulis cenderung memfokuskan terhadap perubahan administratif Jakarta, struktur pemerintahan, serta dampak akibat peralihan fungsi administratif pada periode 1950-1964.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah hal yang penting dilakukan untuk penulisan sejarah. Pembatasan masalah, bertujuan untuk memfokuskan terhadap penelitian sejarah untuk menghindari hal yang tidak berkaitan dengan penelitian. Pembatasan masalah yang dilakukan oleh penulisan sejarah ada dua, yaitu batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal pada penelitian ini meliputi kurun waktu tahun 1950 sampai 1964. Pada tahun 1950, menandai awalnya perubahan administrasi sebagai Kota Praja, sedangkan tahun 1964 menjadi batas penelitian karena ditetapkan nama Jakarta secara resmi melalui Undang-Undang. Batasan spasial pada

penelitian ini yaitu difokuskan terhadap wilayah administratif Jakarta pada periode tersebut.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah peneliti yang sudah dijabarkan, maka peneliti memfokuskan terhadap penelitian dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perubahan status administratif Kota Praja menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 1950-1964?
2. Bagaimana perubahan struktur pemerintahan dan perluasan wilayah Jakarta pada tahun 1950-1964?
3. Bagaimana dampak perubahan status administratif terhadap pembangunan tata kota Jakarta tahun 1950-1964?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai perkembangan kota Jakarta dari Kotapraja menjadi nama resmi Jakarta, dengan adanya perubahan struktur administratif, pembangunan-pembangunan modern sebagai simbol Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia, serta dampak peralihan fungsi administratif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah karya penelitian tentang sejarah perkotaan dan

perkembangan Jakarta secara administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan dan penelitian lanjutan.

- b. Secara praktis, penelitian ini adalah untuk melengkapi referensi dalam penelitian sebelumnya. Terutama memberi referensi bagi kelengkapan sejarah Jakarta.

E. Kerangka Analisis

Dalam menyusun penelitian ini teori yang digunakan oleh peneliti ini adalah konsep teori sejarah perkotaan dan teori otonomi daerah.

1. Teori Sejarah Perkotaan

Kajian sejarah perkotaan dikelompokkan berdasarkan periodisasi kota, yakni kota prasejarah, kota tradisional, kota kolonial, hingga kota modern. Kota tradisional umumnya dipahami sebagai pusat kerajaan-kerajaan awal nusantara yang dibangun berdasarkan pertimbangan magis-religius atau makro-kosmos dengan pola permukiman yang tersusun di sekitar istana atau keraton. Sedangkan, kota kolonial ditandai dengan benteng, perkantoran, dan berbagai infrastruktur yang memperkuat hegemoni pemerintahan kolonial dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Selain berdasarkan periodisasi, kajian sejarah perkotaan juga dapat didekati melalui aspek perencanaan kota dan administrasi. Pembentukan kota-kota di Indonesia dipengaruhi oleh latarbelakang sejarah pemerintahan terutama pada masa kolonial, dengan batas administratif. Perubahan status administratif wilayah

perkotaan seperti transisi dari Kota Praja menuju Daerah Khusus Ibukota, karena fokusnya terhadap kebijakan pemerintahan dan batasan wilayah kota (Makkelo, 2017).

2. Teori Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selalu mementingkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga haruslah selaras dengan pemerintah pusat sebagaimana dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Teori Otonomi daerah didukung oleh dua asas, yaitu asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas desentralisasi menurut Brian C. Smith pembagian wilayah negara ke dalam unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, disertai pembentukan institusi administratif dan politik pada setiap unit tersebut. Asas ini menjadi dasar bagi terciptanya sub-national government yang memiliki kewenangan mengatur wilayahnya sendiri. Dalam hal desentralisasi, Kota Jakarta memiliki kekhususan dalam daerah otonomnya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana perubahan status administratif Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibukota Negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Asas desentralisasi di Jakarta dijalankan langsung oleh Gubernur. Sedangkan asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dalam hal ini, pelimpahan wewenang bertujuan untuk masyarakat daerah dalam menemukan potensinya namun tetap berada dibawah pemerintah pusat. Dekonsentrasi memberikan batas-batas antara kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah dalam mengelola wilayah otonom. Dimana, pemerintah daerah bebas untuk mengatur wilayahnya, namun masih sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini dapat digunakan penulis dalam menganalisis peralihan fungsi administratif Jakarta pada periode tahun 1950-1964. Hal ini selaras dengan dalam penelitian ini, untuk melihat perkembangan administratif Jakarta dari Kotapraja yang mengurus rumah tangganya sendiri di bawah pengawasan Menteri Dalam Negeri hingga menjadi Daerah Khusus Ibukota.

F. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Metode sejarah dalam studi sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode sejarah atau penelitian sejarah. Metode ini terdiri dari lima tahapan penelitian yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2018)

Pertama pemilihan topik, yaitu menentukan topik yang akan dijadikan penelitian. Penulis memilih sebuah topik sejarah yang berjudul *“Transformasi Status Administrasi Jakarta: Dari Kota Praja Menjadi Daerah Khusus Ibukota (1950-1964)”*.

Tahapan kedua heuristik, yaitu pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Data-data yang digunakan berupa sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer berupa dokumen dan arsip yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional. Dalam penelitian ini digunakan pula riset literatur untuk melengkapi data data yang belum lengkap dari sumber primer. Buku-buku, artikel atau referensi lain menjadi data sekunder yang menunjang penelitian ini. Referensi ini digunakan untuk mendukung data utama berupa dokumen. Untuk keperluan itu dikumpulkan buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dan tulisan lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

Tahap ketiga adalah tahap verifikasi, verifikasi yaitu tahapan pengolahan data yang telah berhasil ditemukan sebagai keasbsahan sumber. Menurut (Kuntowijoyo, 2018), verifikasi dibedakan menjadi dua, yakni verifikasi internal dan verifikasi eksternal. Verifikasi internal dilakukan untuk mencari keaslian isi data, sedangkan verifikasi eksternal bertujuan untuk mencari keaslian sumber. Verifikasi sumber ini dimaksudkan untuk mencari keotentikan sumber sehingga akan diperoleh data yang benar-benar keabsahannya. Dalam melakukan verifikasi eksternal, yang ditemukan oleh peneliti yaitu melihat dari kualitas cetakan

dari koran seperti yang ditemukan dalam Koran Berita Indonesia adanya perbedaan kualitas yakni huruf 'j' yang terlihat seperti 'i'.

Tahap keempat adalah tahap interpretasi atau tahapan penafsiran terhadap data yang telah dianalisis dalam tahap kritik. Dalam tahap ini dilakukan penafsiran-penafsiran terhadap data-data yang sudah terseleksi dengan disesuaikan pada tema yang dibahas dengan menggunakan analisis historis kritis. Hal ini dimaksudkan untuk berusaha menguraikan setiap kejadian dan mendeskripsikannya dalam jalinan kausalitas atau sebab-akibat peristiwa itu secara kronologis. Data-data yang tersedia akan menjadi tajam dan hidup apabila analisis terhadap sumber yang ada sangat kritis. Sumber tersebut akan menentukan seberapa bermutunya tulisan yang dihasilkan.

Terakhir, Tahap kelima adalah tahap yang disebut dengan historiografi, yaitu penulisan sejarah berdasarkan pada data-data yang telah melewati tiga tahap tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penulisan deskriptif-naratif, yakni penulis akan menjelaskan sumber-sumber yang telah ditemukan, kemudian ditulis kembali secara sistematis dan kronologis sesuai dengan prinsip penelitian sejarah.

2. Bahan Sumber

Sumber penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah surat kabar, arsip, dan Undang-

Undang yang terkait pada penelitian. Sementara sumber sekunder yang digunakan adalah buku, skripsi, jurnal dan sumber internet yang terkait pada penelitian. Penelitian ini, menggunakan sumber sekunder sementara yaitu Buku *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta* karya The Liang Gie tahun 1958, Buku *Dari Djakarta ke Djakarta: Sedjarah Ibu Kota Kita* karya Soekanto tahun 1954. Buku *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980* karya Edi, Suoratikno, Irmawati, G.A Manilet dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986, Buku *Membayangkan Ibukota Jakarta di Bawah Soekarno* karya Farabih Fakhri tahun 2005, Buku *Karya Jaya: Kenang-Kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1966* karya Seodarmadji tahun 1977, Buku *Jakarta Dari Tepian Air Ke Kota Proklamasi* karya dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Museum, dan Sejarah, Buku *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* karya Ricklefs tahun 2001, serta jurnal dan website yang berkaitan